

**FILOSOFI IDEOLOGIS MOHAMMAD HATTA: JALAN TENGAH ANTARA
LIBERALISME DAN SOSIALISME-KOMUNISME DALAM KONTEKS
INDONESIA**

Detri¹, M.Nursi², Hendrizal³, Dilla Desfrita Wahyuni⁴, Rika Novita⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Pendidikan Dasar FKIP Universitas Bung Hatta
Universitas Bung Hatta

¹detrimelayu88@gmail.com, ²nursi@bunghatta.ac.id,

³hendrizalsipmpd@bunghatta.ac.id, ⁴dilladesfritawahyuni@gmail.com,

⁵rikanovita0215@gmail.com

ABSTRACT

Mohammad Hatta's ideological thinking is one of the important foundations in formulating the direction of ideology and development of the Indonesian nation. Hatta did not position himself as an extreme ideology of liberalism or socialism-communism, but rather formulated a middle path rooted in the values of the people, social justice, and human morality. This article aims to analyze Mohammad Hatta's ideological philosophy and examine the fundamental differences between his thinking and the ideologies of liberalism and socialism-communism in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach with a library research method on Bung Hatta's works and relevant contemporary scientific articles from the past five years. The results of the study show that Hatta criticized liberalism for its tendency to give rise to social inequality due to the dominance of individualism and free market mechanisms, while socialism-communism was criticized for denying individual freedom and potentially giving rise to state totalitarianism. As an alternative, Hatta offered the concept of people's democracy and a cooperative economy that balances individual and collective interests. Hatta's ideological philosophy positions the state as a regulator that ensures social justice, not as an absolute ruler or facilitator of a free market. Thus, Bung Hatta's thinking represents a uniquely Indonesian ideology that is relevant as a reference in addressing the challenges of social inequality and sustainable development in the contemporary era.

Keywords: Mohammad Hatta, ideological philosophy, liberalism, socialism-communism, people's economy.

ABSTRAK

Pemikiran ideologis Mohammad Hatta merupakan salah satu fondasi penting dalam perumusan arah ideologi dan pembangunan bangsa Indonesia. Hatta tidak menempatkan dirinya secara ekstrem pada ideologi liberalisme maupun sosialisme-komunisme, melainkan merumuskan suatu jalan tengah yang berakar pada nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan moralitas kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis filosofi ideologis Mohammad Hatta serta mengkaji perbedaan mendasar pemikirannya dengan ideologi liberalisme dan sosialisme-komunisme

dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) terhadap karya-karya Bung Hatta dan artikel ilmiah kontemporer yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hatta mengkritik liberalisme karena kecenderungannya melahirkan ketimpangan sosial akibat dominasi individualisme dan mekanisme pasar bebas, sementara sosialisme-komunisme dikritik karena menafikan kebebasan individu dan berpotensi melahirkan totalitarianisme negara. Sebagai alternatif, Hatta menawarkan konsep demokrasi kerakyatan dan ekonomi koperasi yang memadukan kepentingan individu dan kolektif secara seimbang. Filosofi ideologis Hatta menempatkan negara sebagai pengatur yang berfungsi menjamin keadilan sosial, bukan sebagai penguasa mutlak maupun fasilitator pasar bebas. Dengan demikian, pemikiran Bung Hatta merepresentasikan suatu ideologi khas Indonesia yang relevan sebagai rujukan dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan pembangunan berkelanjutan di era kontemporer.

Kata Kunci: Mohammad Hatta, filosofi ideologis, liberalisme, sosialisme-komunisme, ekonomi kerakyatan.

A. Pendahuluan

Pemikiran ideologis para pendiri bangsa memiliki peranan fundamental dalam membentuk arah ideologi dan praktik kehidupan bernegara di Indonesia. Di antara tokoh-tokoh tersebut, Mohammad Hatta menempati posisi penting bukan hanya sebagai proklamator, tetapi juga sebagai pemikir yang secara konsisten merumuskan gagasan politik dan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Hatta memandang bahwa kemerdekaan politik harus diikuti oleh kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan manusia sebagai subjek bermartabat (Sitompul, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa ideologi, bagi Hatta, bukan sekadar sistem gagasan

abstrak, melainkan pedoman etis dan praktis bagi kehidupan berbangsa.

Pada abad ke-20, diskursus ideologi dunia didominasi oleh dua arus besar, yaitu liberalisme dan sosialisme-komunisme. Liberalisme menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, serta mekanisme pasar sebagai pilar utama kehidupan ekonomi dan sosial. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan liberalisme secara ekstrem sering melahirkan ketimpangan sosial dan penguasaan sumber daya oleh segelintir elite ekonomi, terutama di negara berkembang (Candra & Subekti, 2025). Kondisi ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial yang menjadi tujuan utama perjuangan bangsa Indonesia.

Sebaliknya, sosialisme-komunisme hadir sebagai kritik terhadap kapitalisme liberal dengan menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan peran dominan negara dalam mengatur ekonomi. Meskipun ideologi ini bertujuan mewujudkan kesetaraan sosial, dalam praktiknya sosialisme-komunisme kerap mengabaikan kebebasan individu dan membuka ruang bagi totalitarianisme negara (Pulungan, 2024). Hatta secara tegas menolak pandangan yang meniadakan hak individu, karena menurutnya manusia tetap harus diakui sebagai pribadi yang bermoral dan merdeka, bukan sekadar bagian dari struktur kolektif.

Dalam konteks tersebut, Mohammad Hatta merumuskan suatu pendekatan ideologis yang berbeda dari dua ideologi besar dunia tersebut. Ia menolak individualisme liberal yang berlebihan sekaligus menentang kolektivisme ekstrem ala sosialisme-komunisme. Hatta menegaskan bahwa ideologi Indonesia harus bertolak dari nilai-nilai sosial masyarakat sendiri, seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa keadilan (Aditiya, 2023). Pemikiran ini kemudian dikenal sebagai demokrasi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan,

yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Konsep ekonomi koperasi menjadi perwujudan konkret dari filosofi ideologis Hatta. Koperasi dipandang sebagai bentuk usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung nilai moral, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Pulungan (2024), koperasi dalam pemikiran Hatta merupakan sintesis antara kepemilikan individu dan tujuan kolektif, sehingga mampu menjadi jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara. Dengan demikian, ekonomi tidak dipisahkan dari nilai etika dan kemanusiaan.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemikiran ideologis Bung Hatta masih relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap demokrasi, dan dominasi kapital global. Sitompul (2023) menegaskan bahwa nasionalisme Hatta bersifat humanis dan inklusif, sehingga mampu menjawab persoalan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan pemikiran

Hatta sebagai jalan tengah ideologis antara liberalisme dan sosialisme-komunisme dalam konteks Indonesia masih relatif terbatas dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis filosofi ideologis Mohammad Hatta serta mengkaji perbedaan mendasar pemikirannya dengan ideologi liberalisme dan sosialisme-komunisme. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi pemikiran Bung Hatta, sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam diskursus ideologi dan pembangunan nasional Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis gagasan, konsep, dan pemikiran ideologis Mohammad Hatta sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya serta dalam kajian ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk

menelaah secara mendalam konstruksi pemikiran Hatta dan membandingkannya dengan ideologi liberalisme dan sosialisme-komunisme secara konseptual dan filosofis.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer berupa karya-karya Mohammad Hatta yang memuat pemikiran ideologis, politik, dan ekonomi, baik dalam bentuk buku, pidato, maupun tulisan esai yang relevan dengan tema demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan keadilan sosial.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi penelitian yang membahas pemikiran Bung Hatta, liberalisme, sosialisme-komunisme, serta ideologi Indonesia. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan penelitian, sumber sekunder yang digunakan dibatasi pada publikasi ilmiah lima tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah

literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menyeleksi sumber berdasarkan kredibilitas akademik, kesesuaian tema, dan kontribusinya terhadap pembahasan filosofi ideologis Mohammad Hatta. Literatur yang telah terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti kritik Hatta terhadap liberalisme, pandangannya tentang sosialisme-komunisme, serta konsep jalan tengah melalui demokrasi dan ekonomi kerakyatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis pemikiran ideologis Mohammad Hatta, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Hatta dengan ideologi liberalisme dan sosialisme-komunisme. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta posisi ideologis Hatta sebagai alternatif di antara dua ideologi besar tersebut. Proses analisis dilakukan secara bertahap, meliputi reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan secara interpretatif.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari penulis dan perspektif yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan guna menghindari bias interpretasi dan memastikan konsistensi argumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Filosofi Ideologis Mohammad Hatta sebagai Jalan Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi ideologis Mohammad Hatta secara konseptual menempati posisi jalan tengah antara liberalisme dan sosialisme-komunisme. Hatta tidak menolak kebebasan individu sebagaimana dalam liberalisme, tetapi juga tidak menerima dominasi pasar bebas yang mengabaikan keadilan sosial. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kebebasan

individu harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan nilai moral kemanusiaan (Sitompul, 2023).

Hatta memandang ideologi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia yang bercirikan kebersamaan dan gotong royong. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemikiran Hatta bersifat kontekstual dan tidak dogmatis, berbeda dengan liberalisme dan sosialisme-komunisme yang cenderung universalistik (Aditiya, 2023).

2. Kritik Mohammad Hatta terhadap Liberalisme

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kritik utama Hatta terhadap liberalisme terletak pada kecenderungan ideologi ini menempatkan individu dan mekanisme pasar sebagai aktor dominan dalam kehidupan ekonomi. Dalam pandangan Hatta, liberalisme yang diterapkan tanpa kontrol negara berpotensi melahirkan ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta penguasaan sumber daya oleh segelintir elite ekonomi (Candra & Subekti, 2025).

Hatta menilai bahwa kebebasan ekonomi dalam liberalisme sering kali hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki modal dan akses, sementara rakyat kecil tersingkir dari proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, Hatta menolak konsep *laissez-faire* dan menegaskan perlunya peran negara sebagai pengatur yang menjamin keadilan sosial. Kritik ini menempatkan Hatta sebagai pemikir yang mengakui pentingnya kebebasan, namun menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan solidaritas sosial.

3. Sikap Mohammad Hatta terhadap Sosialisme-Komunisme

Berbeda dengan kritiknya terhadap liberalisme, penolakan Hatta terhadap sosialisme-komunisme terutama diarahkan pada penghapusan kepemilikan individu dan dominasi negara dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Hatta berpendapat bahwa ideologi ini berpotensi meniadakan kebebasan manusia sebagai individu yang bermoral dan bertanggung jawab (Pulungan, 2024).

Menurut Hatta, keadilan sosial tidak dapat dicapai dengan meniadakan hak individu sepenuhnya, karena hal tersebut justru

bertentangan dengan martabat manusia. Negara yang terlalu dominan juga berisiko melahirkan kekuasaan otoriter yang jauh dari kontrol rakyat. Oleh sebab itu, Hatta menolak sosialisme-komunisme yang bersifat totalistik, meskipun ia mengakui nilai kesetaraan sosial yang diperjuangkan oleh ideologi tersebut.

4. Demokrasi Kerakyatan dan Ekonomi Koperasi sebagai Alternatif Ideologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi kerakyatan dan ekonomi koperasi merupakan inti dari jalan tengah ideologis yang ditawarkan Mohammad Hatta. Demokrasi kerakyatan tidak hanya dimaknai sebagai demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi yang memberikan ruang partisipasi nyata bagi rakyat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Pulungan, 2024).

Koperasi dipandang Hatta sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam koperasi, kepemilikan bersifat kolektif-partisipatif, namun tetap menghormati peran individu. Model ini dianggap mampu mengatasi kelemahan liberalisme yang kapitalistik dan

sosialisme-komunisme yang etatis. Seperti ditegaskan Aditiya (2023), koperasi dalam pemikiran Hatta merupakan instrumen moral dan ekonomi sekaligus, yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial.

5. Relevansi Pemikiran Ideologis Hatta dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Pembahasan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran ideologis Mohammad Hatta tetap relevan dalam menghadapi tantangan Indonesia saat ini. Ketimpangan ekonomi, dominasi kapital global, dan krisis kepercayaan terhadap demokrasi menunjukkan bahwa ekstrem liberalisme maupun sosialisme negara belum mampu memberikan solusi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, gagasan Hatta tentang ekonomi kerakyatan dan peran negara sebagai pengatur memiliki relevansi strategis (Sitompul, 2023).

Pemikiran Hatta menawarkan kerangka ideologis yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan pasar atau negara semata. Dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan dan keadilan, individu dan kolektif,

pemikiran Hatta dapat dipahami sebagai ideologi khas Indonesia yang berpotensi menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

6. Sintesis Perbandingan Ideologis

Berdasarkan hasil analisis, dapat disintesis bahwa liberalisme, sosialisme-komunisme, dan pemikiran Hatta memiliki perbedaan mendasar dalam memandang manusia, negara, dan ekonomi. Liberalisme menempatkan individu dan pasar sebagai pusat, sosialisme-komunisme menempatkan negara dan kolektivitas total, sementara Hatta memadukan keduanya secara seimbang melalui prinsip kerakyatan dan keadilan sosial. Sintesis ini mempertegas posisi Hatta sebagai pemikir ideologi alternatif yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa filosofi ideologis Mohammad Hatta merupakan suatu jalan tengah yang secara sadar dirumuskan sebagai respons kritis terhadap

keterbatasan ideologi liberalisme dan sosialisme-komunisme. Hatta menolak liberalisme yang menempatkan kebebasan individu dan mekanisme pasar sebagai pusat kehidupan ekonomi tanpa kontrol sosial, karena berpotensi melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Di sisi lain, Hatta juga menolak sosialisme-komunisme yang meniadakan kepemilikan individu dan menempatkan negara sebagai penguasa dominan, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan dan martabat manusia.

Sebagai alternatif, Mohammad Hatta menawarkan konsep demokrasi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi yang memadukan kepentingan individu dan kolektif secara seimbang. Dalam pandangan Hatta, negara berperan sebagai pengatur dan penjamin keadilan sosial, bukan sebagai alat kekuasaan maupun fasilitator pasar bebas semata. Ideologi yang dirumuskannya berpijak pada nilai moral, solidaritas sosial, dan kemanusiaan, sehingga selaras dengan karakter sosial budaya bangsa Indonesia.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ideologis Mohammad Hatta tidak hanya

memiliki signifikansi historis, tetapi juga relevansi kontemporer dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional, seperti ketimpangan ekonomi, krisis demokrasi, dan dominasi kapital global. Dengan demikian, filosofi ideologis Bung Hatta dapat dipahami sebagai ideologi khas Indonesia yang berpotensi menjadi rujukan konseptual dalam merumuskan kebijakan publik dan arah pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, N. (2023). Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3586–3592.

Candra, A., & Subekti, A. H. (2025). Pancasila democracy in the view of Mohammad Hatta: A concept that is beginning to move far from its roots. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 13(4), 615–628.

Malahayatie, M., Fauzan, F., & Nurhasanah, N. (2025). Development of Islamic economic concepts in Mohammad Hatta's thoughts on people's economy. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 5(1), 45–60.

Pulungan, M. S. (2024). Sistem ekonomi berdasarkan koperasi dalam konstitusi: Menggali pemikiran koperasi Mohammad Hatta. *Arena Hukum*, 17(2), 210–228.

Sitompul, G. K. (2023). Nasionalisme dalam pemikiran politik Mohammad Hatta. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Islam Cendekia*, 1(1), 1–15.